
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KELURAHAN PIPA REJA KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 6)

OLEH :

MITA ANDRIYANI : 19.11.003

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Mita Andriyani, 19.11.003 with research title Implementation of Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Community Empowerment Institutions (LPMK) in Pipa Reja Village, Kemuning District, Palembang City (Case Study Article 6). Department of Public Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). With Main Supervisor (I) Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) M. Sattarudin M.Si.

The Village Community Empowerment Institution (LPMK) is an institution or forum formed on the initiative of the community as a partner for the village head in accommodating and realizing the aspirations and needs of the community in the field of development. Based on the author's initial observations at the Pipa Reja Village Head Office, it was found that the obstacle to implementing the position and function of LPMK was the lack of activity of LPMK administrators due to busyness so that their performance was not carried out optimally. Lack of facilities such as a secretarial office and limited equipment. The minimal budget allocated by regional governments to villages is also an obstacle to the performance of the institutions themselves.

The method used in this research uses qualitative methods. Where in the qualitative research that will be carried out this is about the Role of Village Community Empowerment Institutions in Community Empowerment in Pipa Reja Village, Kemuning District, Palembang City. The research location in this research is Pipa Reja Village, Kemuning District, Palembang City.

Based on the research results, the researchers concluded that in general the implementation had been carried out well. Judging from communication, outreach has been carried out to the community, then there is the availability of adequate human resources, the very enthusiastic attitude of implementers and the existence of a clear bureaucratic structure and what is an obstacle is that in absorbing and channeling community aspirations, there are still activity programs that have not been implemented in accordance with community expectations. and it is also felt that the training and counseling activities held have not been optimal in improving the quality of human resources

Keywords: Implementation, Village Community Empowerment Institution (LPMK)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik ditanah Negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan dan pemerintahan (Sunyoto 2004:154).

Dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang mengayomi

kehidupan Masyarakat dalam Pember-dayaan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan Pember-dayaan Masyarakat biasa berjalan lebih optimal dan menyeluruh diwilayah kelurahan. Saran dalam fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan, dan pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan mengenai sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

kaitanya dengan dana operasional dari Pemerintah Kota dan penambahan dana operasional lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsi agar didalam penerapan antara anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah dibidang pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Dalam melaksanakan Tugas tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan seperti yang termuat dalam pasal 6 Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pembentukan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat kelurahan
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Salah satu instansi kelurahan yang menerapkan peraturan tentang LPMK adalah Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Namun, berdasarkan observasi penulis menemukan indikasi permasalahan yaitu ;

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu fungsi LPMK, namun penulis menemukan indikasi bahwa masih

belum maksimalnya kegiatan yang dilakukan oleh LPMK dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kelurahan.

2. Adanya keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya diserap dan terwujud.

Dengan adanya adanya program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang mengayomi masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang dalam hal penyerapan aspirasi, pembangunan, gotong royong dan partisipasi, menjadikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh di kelurahan

Berdasarkan observasi awal penulis terhadap temuan masalah yang telah penulis uraikan diatas terkait masih kurang maksimalnya penyerapan serta penyaluran aspirasi dari masyarakat seperti adanya permintaan pengadaan fasilitas olahraga yang belum tersedia dan masih kurangnya kegiatan yang menunjang dalam meningkatkan sumberdaya manusia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan 20 ILIR D-II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut ; Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan 20 ILIR D-II Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6)?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan 20 ILIR D-II Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6) .

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi Kebijakan

Kamus Websterterm (Wahab, 2011:187) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *“to implementasi”* (mengimplementasikan) berarti *“to provide means for carrying out; to give*

practical effect to” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasi, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan menurut Wahab (2011: 272) hendaknya:

1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat.
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya.
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik.
4. dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat terbawah (*street level bureaucracy*).
5. Dilakukan pemantauan terus menerus (monitoring).
6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Maksudnya, pembuat kebijakan harus menilai sama penting antara kebijakan dan implementasinya. sehingga antara kebijakan dan implementasinya tidak terjadi kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, proses (implementasi) kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, sumber daya kebijakan seperti dana, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia (pelaku/agen kebijakan), serta alat kontrol pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

Harsono, (2012:67) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program

Namun, suatu kebijakan dan implementasinya tak selamanya dapat berjalan dengan baik. Pasti terdapat berbagai kendala, permasalahan, ataupun kegagalan mencapai tujuan. Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi. Menurut Wahab, (2011: 272) :

1. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal.
2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan.
5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Sukses gagalnya suatu kebijakan atau implementasinya dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan terhadap kebijakan tersebut, adanya sumber daya, dan pemahaman dan kepatuhan dari para pelaku kebijakan. Sehubungan dengan hal itulah sosialisasi kebijakan, sinergisitas kegiatan/proses dari para pelaku kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan akan menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Maka diperlukan kerangka untuk memantau itu semua yaitu melalui suatu model implementasi.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak

hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Model Implementasi

Dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting dari kebijakan publik antara lain menurut William N. Dunn (Keban, 2014:62) yaitu: penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), Formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assesment*). Akan tetapi dalam kenyataannya betapapun hebatnya suatu kebijakan /rencana yang dibuat tidak akan ada gunanya jika tidak direalisasikan dengan baik dan benar.

Berikut ini beberapa model implementasi dari beberapa tokoh yang dikutip dari Nugroho (2014: 165) :

1. Model Implementasi Donald Van Meter dengan Carl Van Horn

Model kebijakan ini berpola "puncak ke bawah" dan lebih kepada "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Model kebijakan ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier daripada kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan

semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standar dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standar dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut.

Hubungan antar sumber daya (*resources*) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan.

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional.

Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kualitas, dan keadaan agen pelaksana (*implementor*). Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standar dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.

Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana implementasi kebijakan yang efektif sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor implementor kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Model Kerangka Analisis Implementasi (*Framework For Implementation Analysis*) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier

Model implementasi kebijakan ini berada pada kuadran 'puncak ke bawah' dan lebih berada di "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Kedua tokoh tersebut mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

1. Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar;
3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasilnya tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Berdasarkan bagan tersebut, terlihat bahwa proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari faktor atau variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan proses implementasi, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, dan pengaruh faktor luar kebijakan. Kesemuanya berpengaruh pada proses implementasi yang dimulai dengan dihasilkannya keluaran (*output*) kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan dari Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun

Model ini berada di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Menurut kedua pakar ini, untuk melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badanpelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. syarat ini berkenaan dengan feasibilitas dari implementasi kebijakan.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab-akibat, semakin tinggipula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, justru implementasi tidak dapat berjalan secara efektif apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

4. Model Marilee S. Grindle

Model ini berada pada mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Di sini Grindle (2000: 12) telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle ini adalah

bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada *implementability* dari program/kebijakan tersebut. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu bagaimana konten (isi) dan konteks kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Hasil Kebijakan :

1. Dampak pada Masyarakat baik Individu dan kelompok
2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan melihat *gap* (kesenjangan) antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program aksi atau proyek yang dijalankan. Dalam artian, apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan (hasil) yang direncanakan. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi dapat dideteksi dari konten dan konteks kebijakan.

Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu

5. Model Edward III

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu

pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu, *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *beureaucatic structures*.

Adapun Model Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi dari George C. Edward III.

Menurut George C. Edward III (2002:168) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

a. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
- b. Perintah
- c. Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: Gedung, tanah, sarana

dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

b. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

c. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Menurut teori George C. Edward III Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan” (Nugroho, 2003:201).

d. Faktor Disposisi (sikap)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengertian Dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama

bupati/walikota. Defenisi lain tentang peraturan daerah berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemerintah daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh dewan perwakilan daerah dengan kepala daerah, baik diprovinsi maupun di kabupaten/kota. Dalam ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten /kotadan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerahdilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lain.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Ruang lingkup dari peraturan daerah, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004 menjelaskan bahwa peraturan daerah meliputi :

- g. peraturan daerah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Gubernur.
- h. peraturan daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.
- i. peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan kepala desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber-menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe-dengan

mendapat sisipan –m-dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa inggris “empowerment”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata (power) (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat memberdayakan rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah.

Pasal 5 menjelaskan bahwa tugas LPMK adalah:

1. LPMK bertugas:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan;

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6 membahas fungsi LPMK fungsi LPMK Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tinjauan Pembangunan

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi (1981:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa: “Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu” Selaras dengan pengertian di atas, maka secara ringkas dapat dikemukakan bahwa (Mardikanto, 2009:6):

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintahan bersama-sama Segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintahan, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut

Pengertian tentang “pembangunan” sebagaimana telah dikemukakan dalam rumusan (Mardikanto, 2009:6) di atas, memberikan arahan bahwa:

- Pembangunan, merupakan proses yang dilakukan oleh banyak pihak, dalam upayanya untuk terus menerus memperbaiki mutu-hidup masyarakat dan individu-individu yang menjadi anggotanya.
- Dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki itu, kegiatan pembangunan senantiasa memanfaatkan teknologi yang terpilih yang diyakini paling “baik” dalam arti berhasil guna (mangkus) dan berdaya-guna (sangkil).
- Di dalam pengertian tujuan pembangunan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dan individu yang menjadi anggotanya tersebut terkandung pemahaman tentang upaya pemenuhan kebutuhan dan atau pemecahan masalah yang akan dihadapi atau yang telah dirasakan oleh pelaku-pelaku pembangunan tersebut. Yang penting disini adalah

peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

Partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Kerangka Fikir

Menurut Uma Sekaran yang dikutip oleh Sugiyono (2012:60), mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :

Gambar Kerangka Pikir



Sumber : Dikelola Oleh Peneliti

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Nawawi dan Martini dalam Prastowo (2011:22) “Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara.

Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositifisme, Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah (sebagai lawan eksperimen) Dimana peneliti adalah sebagai Instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan tringulasi

(gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

(LPMK) di Kelurahan 20 ILIR D-II Kecamatan Kemuning Kota Palembang .

Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Definisi Operasional

Adapun *Variabel* dan Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1.	Implementasi (Edward III dalam Nugroho,2006;495)	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Sruktur Birokrasi
2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Peraturan Daerah Nomor 4 Pasal 6 Tahun 2019)	1. Penampung dan Penyalur Aspirasi 2. Menanam dan memupuk Persatuan 3. Peningkatan 4. Percepatan 5. Penyusunan dan Pelaksanaan 6. Pengendalian dan Pelestarian 7. Pengembangan dan Penggerak

Informan Penelitian

Sumber informasi adalah informan yang berkomponen dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing mereka adalah Lurah, Perangkat Lurah dan Masyarakat.

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Lurah	1 Orang
2	Sekertaris Kelurahan	1 Orang
3	Ketua LPMK	1 Orang
5	Masyarakat	2 Orang
	Jumlah	5 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi Agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka perlu dilengkapi format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti bukan hanya sekedar mencatat, tetapi juga harus mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.
2. Teknik Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang

diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail.

3. Teknik Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.
4. Teknik Dokumentasi, data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana menurut Denzin dan Lincoln dalam Creswell yang dikutip oleh Rulam Ahmadi (2016:14) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termaksud pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok permasalahannya. Ini berarti para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau mengintreprestasi fenomena dalam

hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut.

Adapun dengan pendapat tersebut diatas, maka analisis yang digunakan adalah kualitatif, dimana data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan 20 ILIR D-II Kecamatan Kemuning Kota Palembang yang di dapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di deskripsikan secara kualitas.

1. Data *Reduction* (reduksi data)

Tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data *Display* (penyajian data)

Setiap data yang diperoleh, disajikan dalam bentuk daftar kategori kemudian melakukan penafsiran dan interpretasi sehingga dapat memperjelas atau menjawab masalah yang diteliti.

3. *Conclulsion drawing/verification* (kesimpulan atau verifikasi)

Melakukan pemahaman terhadap informasi yang didapati, kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat serta proposisi. Kemudian menarik pokok pikiran atau member solusi atau tindakan yang perlu dilakukan setelah memperoleh hasil penelitian sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan begitu seksama dan bertukar pikiran dengan teman sejawat, tringulasi (pemeriksaan keadaan data) sehingga kebenaran dapat dicapai

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6) dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan dalam mengumpulkan data terhadap informan yang dirasa kompeten dan mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis terkait fokus penelitian sebagai dasar dalam pengumpulan data. Lama penelitian ini mulai dari tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa

Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6)

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha menjadi perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses keputusan dasar.

1. Komunikasi

Komunikasi menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan hal pokok pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan program ini, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial (anggaran). Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi

Sikap dan perilaku menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen merupakan perilaku yang perlu perhatian pelaksana kebijakan. Sikap dan perilaku adalah karakter manusia yang mudah

terpengaruh oleh lingkungan dimana manusia itu berada.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi secara kelembagaan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana kebijakan yang mengatur susunan tugas dan hierarki organisasi birokrasi yang berpedoman pada standar operasional prosedur dan mekanisme. Dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mekanisme tata kelola dan disusun sebagai teknis atau sistem pelaksanaan kebijakan yang terencana. Dengan demikian, mekanisme tata kelola fungsi merupakan pedoman untuk mewujudkan visi kebijakan dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau pihak-pihak diluar organisasi.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMK berkedudukan di masing-masing Kelurahan. LPMK mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. LPMK mempunyai beberapa tugas dan fungsi.

a. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Penggalan aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan musyawarah keputusan bersama yang dituangkan dalam agenda kerja LPM dengan menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan sehingga hasil penggalan aspirasi masyarakat kelurahan disampaikan dalam musyawarah. LPMK mengelola aspirasi masyarakat melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat kelurahan untuk disampaikan kepada Lurah dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dokumentasi penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 04 Tahun 2019 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan mengenai fungsi LPMK yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus mengetahui permasalahan di masyarakat dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti.

b. Menanamkan dan Memupuk Rasa Persatuan Kesatuan Masyarakat

Pada zaman sekarang masalah di negeri sangat banyak masalah yang berawal dari rusaknya moral generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Salah satu cara yang paling mudah untuk menumbuhkan rasa persatuan bagi pelajar sekolah yaitu dengan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin agar generasi muda menghargai jasa-jasa para pahlawan yang gugur yang telah berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia tercinta dan meningkatkan rasa nasionalisme juga menanamkan rasa bela tanah air sejak dini.

Cara selanjutnya agar menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yaitu, menghormati dan menghargai perbedaan seperti berbeda agama, suku, ras. Untuk terciptanya tujuan negara dan negara yang damai yaitu harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi sehingga tidak berpecah belah.

Berdasarkan hasil wawancara dokumentasi penulis dapat menyimpulkan bahwa Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja, pengurus LPMK dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus mempunyai sifat saling menghormati dan menghargai, hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan penulis di lapangan yaitu Pengurus LPMK melayani masyarakat dengan senyum dan ramah serta menghormati.

c. Meningkatkan Kualitas dan Mempercepat Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Masyarakat Kelurahan

Pelayanan publik dewasa ini menjadi salah satu ukuran dan indikator pelaksanaan pemerintahan yang berjalan secara sehat dan baik dalam dimensi kapasitas birokrasi yang dapat diandalkan dan diberdayakan. Seperti halnya pada lingkup organisasi swasta dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasinya pada seluruh lini organisasi tersebut dituntut dan menjadikan pelayanan pada pelanggannya sebagai indikator pertama dan utama di dalam proses pelayanan yang diberikannya. Salah satu tuntutan masyarakat

yang harus dipengaruhi dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat adalah agar aparat pemerintah bekerja dengan lebih profesional.

Dalam kualitas pelayanan publik juga dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi mereka (masyarakat) atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima masyarakat sebagai peserta adjudikasi sama dengan harapan akan keinginan mereka, maka peserta tersebut dikatakan sudah memuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa tentang fungsi LPMK Pipa Reja mengenai meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat terlihat Pengurus LPMK menyampaikan saran dan kritik dari masyarakat kepada kelurahan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

d. Menyusun Rencana, Melaksanakan, Mengendalikan, Melestarikan dan Mengembangkan Hasil Pembangunan Secara Partisipatif

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi menjadi 3 tahap yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Hal ini dibedakan bahwa partisipasi masyarakat dalam:

1. Perencanaan pembangunan diwujudkan dengan aspirasi masyarakat
2. Pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan bentuk partisipasi. Wujud nyata partisipasi dapat berupa tenaga, uang, dan harta benda.
3. Evaluasi pembangunan diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Menilai dengan cara langsung atau tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Pelayanan publik dewasa ini menjadi salah satu ukuran dan indikator pelaksanaan pemerintahan yang berjalan secara sehat dan baik dalam dimensi kapasitas birokrasi yang dapat diandalkan dan diperdayakan. Seperti halnya pada lingkup organisasi swasta dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasinya pada seluruh lini organisasi tersebut dituntut dan menjadikan pelayanan pada pelanggannya sebagai indikator pertama dan utama di dalam proses pelayanan yang diberikannya. Salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipengaruhi dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat

adalah agar aparat pemerintah bekerja dengan lebih profesional.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan peraturan daerah Kota Palembang nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja (Studi Kasus Pasal 6) pengurus LPMK dalam menyusun rencana pembangunan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif dengan cara bekerja sama serta berkoordinasi dengan Pemerintahan Kelurahan hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan penulis di lapangan yaitu Pembangunan Cor Jalan dan Pembuatan Parit.

e. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong

Gotong royong merupakan budaya yang menjadi salah satu identitas perilaku kolektif masyarakat Indonesia. Bergotong royong adalah salah satu kegiatan sosial yang sangat mulia dan tanpa pamrih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, dahulu kita dengan mudah dapat menjumpai budaya gotong royong misalkan, mendirikan rumah, mengerjakan sawah, membantu tetangga yang sedang berduka dan kerjasama tersebut bukan hanya dilakukan sanak keluarga yang terkait saja, tetapi semua masyarakat kampung yang berbaur dalam kerjasama demi proses acara atau kegiatan bisa berlangsung dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning (Studi Kasus Pasal 6) pengurus LPMK dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi swadaya serta gotong royong telah dilaksanakan secara optimal hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan penulis di lapangan yaitu kegiatan gotong royong hari minggu.

Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, maka berikut dilakukan pembahasan hasil penelitian.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6)

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses keputusan dasar.

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6), maka berikut dilakukan pembahasan dari hasil penelitian.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dalam melaksanakan implementasi peraturan tersebut pengurus LPMK telah mengkomunikasikan peraturan tersebut kepada pihak-pihak terkait termasuk pihak kelurahan dalam setiap permasalahan yang ada didalam masyarakat.

Komunikasi yang diteorikan oleh George Edward III sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa komunikasi yang merupakan Konsep Model Implementasi menurut George Edward III yang digunakan dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning telah dilaksanakan secara optimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan hal pokok pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan program ini, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial (anggaran). Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif

Sumber daya manusia yang handal dan mempunyai kemampuan yang dimiliki pada Pengurus LPMK Pipa Reja dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja masih kurang dalam menerapkan peraturan tersebut dibutuhkan pembinaan dan pelatihan untuk pengurus LPMK.

Menurut George Edward III sukses gagalnya suatu kebijakan atau implementasinya dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan terhadap kebijakan tersebut. Adanya sumberdaya, dan pemahaman dan kepatuhan dari para pelaku kebijakan. Sehubungan dengan hal itulah sosialisasi kebijakan, sinergisitas kegiatan/proses dari monitoring pelaksanaan kebijakan akan menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa Indikator Sumber Daya yang merupakan Konsep Model Implementasi menurut George Edward III yang digunakan dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja masih belum menerapkan peraturan tersebut dikarenakan pendidikan yang dimiliki berpendidikan SMA dan perlu pembinaan serta pelatihan

3. Disposisi

Sikap dan perilaku menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen merupakan perilaku yang perlu perhatian pelaksana kebijakan. Sikap dan perilaku adalah karakter manusia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dimana manusia itu berada. Jika lingkungan pelaku pelaksana

kebijakan didominasi orang-orang dengan mengedepankan kejujuran, komitmen dan tanggung jawab, maka sikap dan perilaku di lingkungan tersebut akan mengarahkan pelaksanaan kebijakan pada arah yang benar. Sikap dan perilaku positif juga perlu mendapat reward atau sebaliknya punishment bagi yang lalai sehingga menimbulkan spirit yang dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan guna mewujudkan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa disposisi yang merupakan Konsep Model Implementasi menurut George Edward III yang digunakan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja melalui pendekatan secara keseluruhan dilihat pengurus LPMK merespon setiap permasalahan yang ada di masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Sikap dan perilaku menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen merupakan perilaku yang perlu perhatian pelaksanaan kebijakan. Sikap dan perilaku adalah karakter manusia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dimana manusia itu berada. Jika lingkungan pelaku pelaksanaan kebijakan didominasi orang-orang dengan mengedepankan kejujuran, komitmen dan tanggung jawab, maka sikap dan perilaku di lingkungan tersebut akan mengarahkan pelaksanaan kebijakan pada arah yang benar Struktur birokrasi yang diimplementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning masih perlu binaan dan dukungan dari Pemerintah terkait.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning karena struktur birokrasi yang ada masih perlu arahan dan dukungan dari pemerintah terkait.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah prakarsa masyarakat kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, antara lain :

a. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masyarakat kelurahan antara lain melalui pertemuan warga secara berkala dan insidental.

LPMK bersama pihak kelurahan bekerjasama mengadakan pertemuan ataupun rapat yang dihadiri oleh para warga untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya, setiap masukan-masukan yang dikemukakan oleh warga akan ditampung oleh LPMK yang dikemudian hari akan diwujudkan pelaksanaannya.

Hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hak warga dalam turut andil untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan kelurahan, warga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada LPMK yang nanti akan dibahas bersama pemerintahan kelurahan dalam mewujudkan pelaksanaannya.. Namun dalam menyerap seluruh aspirasi dari warga LPMK dirasa masih belum begitu maksimal, karena masih ada keluhan-keluhan warga yang mengindikasikan bahwa aspirasi warga tidak sepenuhnya ada yang dilaksanakan ataupun terwujud.

b. Menanamkan dan Memupuk Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Penanaman dan pemupukan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat kelurahan antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong royong pertemuan warga secara berkala dan insidental.

Pihak kelurahan secara terjadwal melakukan pertemuan dan rapat koordinasi bersama pengurus LPMK, adapun pertemuan yang diselenggarakan selain mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang LPMK, pertemuan tersebut juga diharapkan mampu menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan diantara pihak kelurahan, LPMK dan juga warga.

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa usaha yang dilakukan pihak kelurahan dan LPMK dalam menanamkan dan memupuk rasa persatuan masyarakat sudah baik. Ini dapat dilihat dari terjadwalnya pertemuan antar pengurus LPMK, pihak kelurahan dan masyarakat setempat, adanya silaturahmi yang terjalin dalam pertemuan tersebut menjadikan setiap individu saling mengenal satu sama lain.

c. Meningkatkan Kualitas dan Mempercepat Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Masyarakat Kelurahan

Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan antara lain melalui sumber daya dan program yang prima diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Sebagai mitra pemerintah, LPMK memiliki peran sebagai penyambung informasi dari kelurahan ke masyarakat, begitu pula sebaliknya setiap aspirasi masyarakat yang terserap akan diteruskan ke pemerintah setempat untuk dapat diwujudkan. Dalam membantu pemerintah untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat, LPMK berperan sebagai sarana warga dalam mengetahui dan mendapatkan setiap program pelayanan masyarakat yang ada di kelurahan.

Dari hasil penelitian penulis menilai bahwa dengan adanya LPMK di tengah masyarakat kelurahan, kegiatan pelayanan masyarakat yang ada di kelurahan menjadi lebih terbantu karena dengan adanya peran LPMK, masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan sosialisasi mengenai program-program yang dibuat oleh pemerintah.

d. Menyusun Rencana, Melaksanakan, Mengendalikan, Melestarikan, dan Mengembangkan Hasil Pembangunan Secara Partisipatif

Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan melalui pendataan potensi kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pengendalian serta pemecahan masalah pembangunan.

Pengurus LPMK dalam menyusun rencana pembangunan secara prosedurnya selalu mengikutsertakan warga dan juga pihak kelurahan tentunya, para pengurus LPMK biasanya menyerap terlebih dahulu masukan-masukan dari warga pada saat rapat untuk menyusun rencana pembangunan kedepannya yang akan dilaksanakan, setelah aspirasi warga telah ditampung barulah pengurus LPMK bersama pihak kelurahan merealisasikannya ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat kelurahan tentunya. Namun seluruh aspirasi masyarakat sebagian tidak dapat segera diwujudkan karena minimnya sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun dana.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil

pembangunan seutuhnya menjadi tanggung jawab LPMK sebagai pemrakarsa dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dengan adanya peran LPMK tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa fungsi LPMK sudah berjalan cukup baik walaupun di dalam pelaksanaan pembangunan pastinya menemukan kendala, seperti sumber daya.

e. Menumbuhkan, Mengembangkan, dan Menggerakkan Prakarsa, Partisipasi, Swadaya Serta Gotong Royong Masyarakat

Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat adalah salah satu fungsi daripada LPMK yang begitu penting.

Kegiatan bersih-bersih lingkungan, pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat kelurahan dan juga kegiatan sosial yang diadakan LPMK untuk masyarakat dilakukan secara gotong royong, masyarakat diajak berpartisipasi dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swadaya. Pengurus LPMK bersama pihak kelurahan melalui RT setempat sebelumnya mensosialisasikan kepada warga agar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dari hasil penelitian diatas, penulis dapat memberikan analisa bahwa fungsi LPMK dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat telah dilakukan pengurus LPMK secara baik, ini dapat dilihat dari adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK bersama pihak kelurahan dalam melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara gotong royong. Namun penulis juga melihat bahwa ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu masih minimnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dana.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pipa Reja Kecamatan Kemuning (Studi Kasus Pasal 6) dapat diambil simpulan sebagai berikut.

Dari hasil penelitian adanya beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih ada program kegiatan yang belum dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat dan juga kegiatan penyuluhan yang diadakan dirasa belum begitu

maksimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Saran

Melihat hasil penelitian di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang sifatnya membangun dan bermanfaat bagi peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning dan pembaca pada umumnya. Adapun saran dari penulis untuk dan pembaca pada umumnya ialah sebagai berikut :

Diharapkan dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning tersebut harus selalu meningkatkan keaktifannya agar masyarakat umum bisa lebih mengerti tentang (LPM) tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan hubungan kerjasama dan saling membantu baik bersifat partisipatif dan konsultatif dengan pemerintahan kelurahan bersama perangkat RT, RW, dan masyarakat setempat.

Penulis tahu bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu penulis berharap kepada pembaca pada umumnya untuk memberikan saran/masukan kepada penulis agar kedepannya penulis bisa mengetahui sisi kekurangan penulis sendiri.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syukur. 2004. Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan" Ujung Pandang: Persadi
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Awang, S.A. 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat*. Harapan Prima: Jakarta.
- Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepulish: Yogyakarta.
- Dwiyanto indiahono. 2009. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analicys*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Harsono. 2002. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Gafindo Jaya: Jakarta
- Hikmal, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Nofriansyah, Deny. 2014. *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Deepublish: Yogyakarta.
- Raho B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta.
- Sagian P. Sodang. 2008. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Bumi Akasara: Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sulistiyani. 2011. *Manajamen Sumber Daya*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Surjaweni, Wiratna V. 2020. *Metode Penelitian*. Pusaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press: Surakarta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan*. AIPI: Bandung
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi*. Grasindo: Jakarta
- Wibawa, Samudra. 2011. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Prabowo. P, Dkk. 2011. *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2014. *Etika Pembangunan*. Center For Academic Publishing Service: Yogyakarta
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Pipa Reja.